

ANALISIS PERENCANAAN DAN KEBIJAKAN PUBLIK DALAM MENGATASI KURANGNYA LAPANGAN PEKERJAAN

Ermelia Sema Indaputri Zadrak¹, Mariano Liberty², Periyati A. Benu³, Oktovina Nana⁴, Lasarus Jehamat⁵, Imelda Nahak⁶

¹²³⁴⁵⁶ Program Studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana

ARTICLE INFO

Article history:

Received Januari, 2026

Revised Januari, 2026

Accepted Januari, 2026

Available Januari, 2026

ermeliasadrak@gmail.com,
mariantoliberti09@gmail.com,
periyatibenu03@gmail.com,
oktovinanana@gmail.com,
jehamat.lasarus@yahoo.co.id,
imelda_nahak@staf.undana.ac.id

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.
Copyright © 2023 by Author. Published by Cahaya Ilmu
Bangsa Institute

ABSTRAK

Kurangnya lapangan pekerjaan merupakan persoalan struktural dalam pembangunan sosial dan ekonomi di Indonesia yang berdampak pada tingginya pengangguran. Penelitian ini bertujuan menganalisis perencanaan dan kebijakan publik pemerintah dalam mengatasi permasalahan tersebut. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif-analitis berbasis data sekunder dari dokumen pemerintah, laporan BPS, dan literatur ilmiah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengangguran, termasuk pengangguran terdidik, masih tinggi akibat ketidaksesuaian kompetensi tenaga kerja dengan kebutuhan pasar, lemahnya integrasi kebijakan pendidikan dan ketenagakerjaan, serta perencanaan pembangunan yang belum berorientasi pada penciptaan lapangan kerja. Sektor informal menjadi penopang utama penyerapan tenaga kerja namun belum didukung kebijakan berkelanjutan. Penelitian ini menegaskan perlunya perencanaan berbasis data, peningkatan kualitas SDM, dan integrasi kebijakan lintas sektor.

Kata kunci: kebijakan publik, perencanaan pembangunan, pengangguran, lapangan pekerjaan.

ABSTRACT

The lack of employment opportunities constitutes a structural problem in Indonesia's social and economic development, contributing to persistent unemployment. This study aims to analyze government planning and public policies in addressing this issue. A qualitative descriptive-analytical approach was employed using secondary data from government documents, BPS reports, and relevant academic literature. The findings indicate that unemployment, including educated unemployment, remains high due to a mismatch between workforce competencies and labor market demands, weak integration between education and employment policies, and development planning that is insufficiently oriented toward job creation. The informal sector continues to absorb a large share of the workforce but lacks supportive and sustainable policies. This study highlights the need for data-driven planning, improved human resource quality, and stronger cross-sector policy integration.

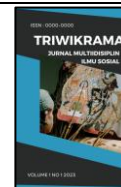
Keywords: public policy, development planning, unemployment, employment opportunities.

1. PENDAHULUAN

Salah satu permasalahan utama yang dihadapi Indonesia hingga saat ini adalah tingginya angka pengangguran sebagai akibat dari terbatasnya lapangan pekerjaan. Kurangnya lapangan pekerjaan merupakan salah satu permasalahan utama dalam pembangunan sosial dan ekonomi di Indonesia. Pertumbuhan jumlah angkatan kerja yang tidak diimbangi dengan penciptaan kesempatan kerja menyebabkan meningkatnya angka pengangguran serta berbagai persoalan sosial seperti kemiskinan dan kerentanan sosial (BPS, 2023; Sosioinforma, 2021). Kondisi ini

*Corresponding author

E-mail addresses: nenimael559@gmail.com



menunjukkan bahwa pengangguran bukan sekadar persoalan ekonomi, melainkan masalah struktural yang berkaitan erat dengan perencanaan pembangunan dan kebijakan publik.

Dalam konteks pembangunan nasional, ketidakseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan daya serap tenaga kerja mengindikasikan lemahnya sinkronisasi antara kebijakan ekonomi, pendidikan, dan ketenagakerjaan. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa meskipun tingkat pengangguran terbuka mengalami tren penurunan, sebagian tenaga kerja—termasuk lulusan pendidikan menengah dan tinggi—masih menghadapi kesulitan memperoleh pekerjaan yang sesuai dengan kompetensinya (BPS, 2023). Hal ini mencerminkan adanya ketidaksesuaian antara kebutuhan pasar kerja dan kualitas sumber daya manusia yang dihasilkan oleh sistem pendidikan.

Selain itu, sektor informal masih menjadi penopang utama penyerapan tenaga kerja di Indonesia. Namun, sebagian besar pekerjaan di sektor ini belum didukung oleh perlindungan sosial dan jaminan kerja yang memadai, sehingga rentan terhadap ketidakpastian ekonomi (Sosioinforma, 2021). Ketimpangan kesempatan kerja antarwilayah juga memperparah permasalahan ketenagakerjaan dan mendorong terjadinya urbanisasi ke wilayah perkotaan (Jurnal Administrasi Publik, 2023). Kondisi ini menegaskan bahwa perencanaan dan kebijakan publik memiliki peran strategis dalam menciptakan lapangan kerja yang inklusif, berkelanjutan, dan merata.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perencanaan dan kebijakan publik pemerintah dalam mengatasi kurangnya lapangan pekerjaan di Indonesia serta mengidentifikasi berbagai tantangan dalam implementasinya. Kajian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan rekomendasi bagi perbaikan kebijakan ketenagakerjaan dalam rangka mendukung pembangunan sosial dan ekonomi yang berkelanjutan.

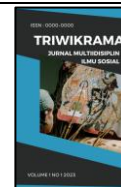
Oleh karena itu, analisis terhadap perencanaan dan kebijakan publik dalam mengatasi kurangnya lapangan pekerjaan menjadi penting untuk dilakukan. Kajian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai kondisi ketenagakerjaan saat ini serta menjadi bahan evaluasi dan rekomendasi bagi perbaikan kebijakan penciptaan lapangan kerja di Indonesia.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi deskriptif-analitis yang bertujuan untuk memahami dan menganalisis secara mendalam perencanaan serta kebijakan publik yang diterapkan pemerintah dalam mengatasi permasalahan kurangnya lapangan pekerjaan. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang berfokus pada penggambaran dan analisis kondisi, kebijakan, serta strategi pemerintah dalam penanggulangan pengangguran tanpa melakukan pengujian hipotesis. Penelitian ini menitikberatkan pada analisis kebijakan publik dan perencanaan pembangunan ketenagakerjaan dengan memanfaatkan data sekunder yang diperoleh dari dokumen resmi pemerintah, peraturan perundang-undangan, laporan Badan Pusat Statistik (BPS), jurnal ilmiah, buku, serta berbagai sumber pustaka lain yang relevan dengan topik ketenagakerjaan dan kebijakan publik.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan data sekunder Badan Pusat Statistik (BPS) mengenai jumlah dan persentase penduduk bekerja dan pengangguran, dapat diketahui bahwa dinamika pasar tenaga kerja di Indonesia masih menunjukkan ketidakseimbangan antara pertumbuhan angkatan kerja dan kemampuan penciptaan lapangan pekerjaan. Data tersebut memperlihatkan bahwa meskipun jumlah penduduk yang bekerja cenderung meningkat, persentase pengangguran masih bertahan pada tingkat yang relatif signifikan, khususnya pada kelompok usia produktif dan lulusan



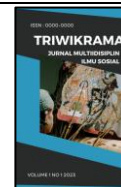
pendidikan menengah hingga tinggi (BPS, 2023). Kondisi ini mengindikasikan bahwa peningkatan kesempatan kerja belum sepenuhnya mampu menyerap tambahan angkatan kerja baru secara optimal. Temuan ini memperkuat hasil penelitian bahwa permasalahan pengangguran di Indonesia bersifat struktural dan berkaitan erat dengan lemahnya perencanaan pembangunan ketenagakerjaan serta kebijakan publik yang belum sepenuhnya berbasis pada kebutuhan riil pasar kerja. Dengan demikian, data BPS menjadi bukti empiris bahwa pertumbuhan ekonomi dan peningkatan jumlah penduduk bekerja belum secara otomatis berdampak pada penurunan pengangguran, sehingga diperlukan perencanaan dan kebijakan publik yang lebih terintegrasi, berkelanjutan, dan berorientasi pada penciptaan lapangan kerja yang berkualitas.

Data BPS juga memperlihatkan bahwa pengangguran tidak hanya dialami oleh masyarakat berpendidikan rendah, tetapi juga oleh lulusan pendidikan menengah dan tinggi. Fenomena ini menegaskan bahwa permasalahan pengangguran tidak semata-mata disebabkan oleh rendahnya pendidikan, melainkan oleh ketidaksesuaian antara kompetensi tenaga kerja dan kebutuhan dunia usaha. Hasil analisis terhadap dokumen perencanaan pembangunan menunjukkan bahwa kebijakan ketenagakerjaan di Indonesia masih cenderung bersifat sektoral dan belum terintegrasi secara menyeluruh. Perencanaan pembangunan nasional lebih menekankan pada pertumbuhan ekonomi makro dibandingkan penciptaan lapangan kerja yang berorientasi pada penyerapan tenaga kerja. Hal ini sejalan dengan temuan penelitian dalam *Sosioinforma* yang menyatakan bahwa kebijakan pembangunan sering kali belum menjadikan penciptaan lapangan kerja sebagai prioritas utama dalam perencanaan jangka menengah dan panjang. Kondisi tersebut menyebabkan pertumbuhan ekonomi yang terjadi belum mampu menciptakan kesempatan kerja yang luas dan berkelanjutan. Akibatnya, pengangguran tetap menjadi persoalan yang berulang meskipun terdapat peningkatan aktivitas ekonomi di berbagai sektor.

Pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan publik untuk mengatasi pengangguran, seperti pelatihan kerja, peningkatan keterampilan tenaga kerja, dan pengembangan kewirausahaan. Namun, berdasarkan analisis terhadap jurnal *Jurnal Kebijakan Publik (JKP)* dan *JIMBE*, kebijakan tersebut masih menghadapi kendala pada tahap implementasi. Program-program ketenagakerjaan sering kali belum tepat sasaran, kurang berkelanjutan, serta tidak disertai dengan sistem evaluasi yang efektif. Data BPS menunjukkan bahwa meskipun terdapat program peningkatan keterampilan, tingkat pengangguran masih relatif tinggi. Hal ini mengindikasikan bahwa kebijakan publik yang ada belum sepenuhnya mampu menjawab akar permasalahan pengangguran, khususnya terkait kesenjangan antara dunia pendidikan dan dunia kerja.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem pendidikan memiliki kontribusi signifikan terhadap tingginya angka pengangguran terdidik. Data BPS menunjukkan bahwa lulusan sekolah menengah dan perguruan tinggi masih mendominasi angka pengangguran terbuka. Temuan ini sejalan dengan penelitian yang dipublikasikan dalam *Sosioinforma*, yang menyatakan bahwa orientasi pendidikan yang terlalu menekankan aspek teoritis tanpa keterampilan praktis menyebabkan rendahnya daya saing lulusan di pasar kerja. Dalam perspektif kebijakan publik, kondisi ini menunjukkan lemahnya koordinasi antara kebijakan pendidikan dan kebijakan ketenagakerjaan. Tanpa perencanaan yang terintegrasi, sistem pendidikan akan terus menghasilkan lulusan yang tidak sesuai dengan kebutuhan dunia kerja.

Berdasarkan data BPS, sebagian besar tenaga kerja Indonesia masih terserap di sektor informal. Sektor ini menjadi alternatif utama bagi masyarakat yang tidak terserap di sektor formal. Namun, penelitian terdahulu dalam *Academia.edu* dan *JIMBE* menunjukkan bahwa sektor informal cenderung memiliki produktivitas rendah dan minim perlindungan tenaga kerja. Hasil



penelitian ini memperkuat temuan tersebut, di mana sektor informal berperan sebagai penyangga pengangguran, tetapi belum didukung oleh kebijakan publik yang memadai. Oleh karena itu, perencanaan kebijakan publik seharusnya tidak hanya berfokus pada perluasan sektor formal, tetapi juga pada peningkatan kualitas dan keberlanjutan sektor informal.

Data BPS juga menunjukkan adanya ketimpangan kesempatan kerja antarwilayah. Daerah perkotaan memiliki peluang kerja yang lebih besar dibandingkan daerah pedesaan, sehingga mendorong arus urbanisasi. Penelitian dalam *JAP* dan *JKP* menunjukkan bahwa ketimpangan ini disebabkan oleh perencanaan pembangunan daerah yang belum optimal dalam memanfaatkan potensi ekonomi lokal. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kebijakan publik dalam mengatasi pengangguran perlu mempertimbangkan dimensi kewilayahan agar penciptaan lapangan kerja dapat dilakukan secara merata.

Kurangnya lapangan pekerjaan berdampak langsung pada meningkatnya kemiskinan dan kerentanan sosial. Berdasarkan data BPS dan kajian dalam *Sosioinforma*, pengangguran berkorelasi dengan meningkatnya masalah sosial seperti ketidakstabilan ekonomi rumah tangga dan menurunnya kualitas hidup masyarakat. Oleh karena itu, kebijakan ketenagakerjaan tidak dapat dipisahkan dari kebijakan sosial dan kesejahteraan.

Secara umum, hasil penelitian ini mendukung penelitian-penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa pengangguran di Indonesia merupakan masalah struktural yang dipengaruhi oleh perencanaan pembangunan, kebijakan publik, dan kualitas sumber daya manusia. Temuan ini sejalan dengan artikel-artikel dalam *JAP*, *Sosioinforma*, *JKP*, dan *JIMBE* yang menekankan pentingnya integrasi kebijakan lintas sektor.

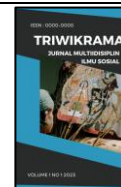
Berdasarkan hasil dan pembahasan, perencanaan dan kebijakan publik dalam mengatasi kurangnya lapangan pekerjaan perlu diarahkan pada penguatan perencanaan berbasis data, peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan kerja, serta pengembangan sektor informal dan kewirausahaan. Data BPS dan hasil penelitian terdahulu menjadi dasar penting dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif dan berkelanjutan.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa permasalahan kurangnya lapangan pekerjaan di Indonesia memerlukan pendekatan kebijakan publik yang terintegrasi dan berbasis perencanaan jangka panjang. Dengan memanfaatkan data BPS dan dukungan penelitian sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa keberhasilan kebijakan ketenagakerjaan sangat ditentukan oleh konsistensi perencanaan, koordinasi antarinstansi, serta kesesuaian kebijakan dengan kebutuhan pasar kerja.

4. SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa permasalahan kurangnya lapangan pekerjaan di Indonesia merupakan persoalan struktural yang dipengaruhi oleh ketidakseimbangan antara pertumbuhan angkatan kerja dan kemampuan perekonomian dalam menciptakan kesempatan kerja. Perencanaan dan kebijakan publik yang telah diterapkan pemerintah dalam mengatasi pengangguran belum sepenuhnya berjalan efektif karena masih bersifat sektoral, kurang terintegrasi, dan menghadapi berbagai kendala dalam tahap implementasi. Selain itu, ketidaksesuaian atau tidak sinkronisasi antara sistem pendidikan dengan kebutuhan industri, serta antisipasi terhadap perubahan teknologi dan dinamika ekonomi global. Perencanaan yang efektif juga harus melibatkan seluruh stakeholder, termasuk pemerintah, swasta, akademisi, dan masyarakat sipil dan juga kebutuhan pasar kerja yang turut memperbesar angka pengangguran, termasuk pengangguran terdidik yang mencakup pengembangan ekonomi yang kurang produktif, kurangnya kualitas SDM, dan perlindungan tenaga kerja yang kurang. Data



Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa sektor informal masih menjadi penyangga utama penyerapan tenaga kerja, namun belum didukung oleh kebijakan yang mampu meningkatkan kualitas dan keberlanjutan pekerjaan. Oleh karena itu, diperlukan perencanaan dan kebijakan publik yang komprehensif, terintegrasi, dan berbasis data, dengan menitikberatkan pada penciptaan lapangan kerja berkelanjutan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta penguatan koordinasi antar sektor agar permasalahan kurangnya lapangan pekerjaan dapat diatasi secara lebih efektif dan berkelanjutan.

Saran

Berdasarkan temuan penelitian tersebut, pemerintah disarankan untuk memperkuat perencanaan dan kebijakan publik di bidang ketenagakerjaan secara lebih terintegrasi dan lintas sektor, dengan mengedepankan pendekatan berbasis data dan kebutuhan pasar kerja. Kebijakan penciptaan lapangan kerja perlu diarahkan pada pengembangan sektor-sektor produktif yang memiliki daya serap tenaga kerja tinggi, baik di sektor formal maupun informal, disertai dengan dukungan regulasi yang mampu meningkatkan kualitas, perlindungan, dan keberlanjutan pekerjaan.

Selain itu, diperlukan penguatan sinergi antara sistem pendidikan dan dunia industri melalui penyesuaian kurikulum, pengembangan pendidikan vokasi, serta peningkatan program pelatihan dan reskilling tenaga kerja agar lebih adaptif terhadap perubahan teknologi dan dinamika ekonomi global. Pemerintah juga perlu melibatkan seluruh pemangku kepentingan, termasuk sektor swasta, akademisi, dan masyarakat sipil, dalam perumusan dan implementasi kebijakan ketenagakerjaan. Di sisi lain, peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan perlindungan tenaga kerja, serta pemberdayaan sektor informal menjadi langkah strategis untuk menekan angka pengangguran, khususnya pengangguran terdidik, dan mewujudkan penciptaan lapangan kerja yang berkelanjutan.

5. DAFTAR PUSTAKA

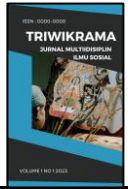
- Badan Pusat Statistik. (2022). *Statistik migrasi dan pekerjaan informal di Indonesia*. BPS.
- BPS Kota Kupang. (2021). *Profil Kelurahan Oesapa*. BPS Kota Kupang.
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (5th ed.). SAGE Publications.
- Habibullah, Irmayani, N., & Rahman, A. (2016). Perlindungan sosial dalam mendukung proses pembangunan. *Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial*.
- Maryati. (2012). Peran negara dalam penyelenggaraan perlindungan sosial. *Jurnal Kesejahteraan Sosial*.
- Putri, R., & Santoso, H. (2020). Kesenjangan sosial dan akses layanan publik di kawasan perkotaan: Studi kasus pedagang kaki lima. *Jurnal Sosiologi Urban*, 12(2), 45-58.
- Rahmadhani, S., Fauzi, R. M., & Nulhaqim, S. A. (2022). Peran pekerja sosial dalam perlindungan bagi pekerja migran. *Jurnal Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (JPPM)*, 3(2), 87-95.
- Rahmawati, & Kamilah. (2020). *Perlindungan sosial bagi kelompok rentan dalam perspektif kebijakan sosial*.
- Suharto, E. (2009). *Kemiskinan dan perlindungan sosial di Indonesia: Menggagas model jaminan sosial universal bidang kesehatan*. Alfabeta.
- Sutrisno, A. (2019). *Migrasi pekerja informal dan strategi bertahan hidup di kota besar*. Pustaka Pelajar.

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial

Volume 11, Number 10, 2026

E-ISSN: 2988-1986

Open Access:



Tim Nasional Pekerja Migran Indonesia. (2021). *Laporan kondisi pekerja migran di sektor informal*. Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia.